

## ABSTRAK

**Ahmad Dzikri Abdil Mushawwir:** Penelitian ini berjudul “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 (Studi Kasus Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukabumi)*”.

Penelitian ini lahir dengan landasan yuridis adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Akan tetapi produk hukum tersebut kurang optimal karena pada faktanya banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan yuridis lahirnya Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2015, mengetahui Tugas dan Fungsi Satpol-PP dalam Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2015, dan mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Melaksanakan Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori, yaitu: teori pembentukan peraturan daerah, teori kepemimpinan, teori efektivitas hukum dan teori kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris serta jenis data yang digunakan jenis data kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Sukabumi. Kemudian untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa *Pertama* landasan yuridis lahirnya Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2015 adalah adanya bahaya akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, ketertiban, tumbuh suburnya penyakit masyarakat dan kematian maka perlu adanya aturan larangan minuman beralkohol. *Kedua* dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Satpol PP dibantu oleh TNI, Polri dan masyarakat, mengadakan operasi minol, Satpol PP melakukan jebakan, dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Namun terdapat hambatan yang dihadapi terkait keterbatasan anggaran maupun personil, Kab. Sukabumi daerah pariwisata, fasilitas operasional belum lengkap dan rekrutmen Satpol PP belum terselenggara. Dan *Ketiga* tinjauan siyasah dusturiyah terkait Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam melaksanakan Perda No. 7 Tahun 2015 telah mencakup prinsip menghilangkan kemudharatan sehingga tercipta kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

**Kata Kunci :** Satpol PP, Peraturan Daerah, Larangan Minuman Beralkohol dan Siyasah Dusturiyah.